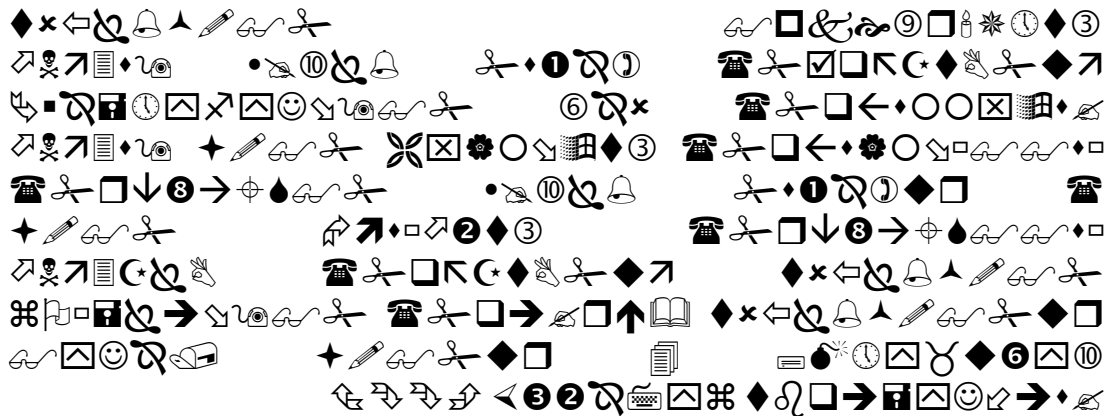


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pembangunan suatu bangsa dan bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang positif bagi siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan, sehingga menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut dalam rangka membentuk sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas, memiliki nilai keagamaan yang mantap serta memiliki kemampuan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

Firman Allah dalam surah Al-Mujaadilah ayat 11 berbunyi:



Ayat tersebut di atas terkandung adanya perintah untuk menuntut ilmu karena orang-orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang tidak berilmu, dan juga mengungkapkan bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 BAB II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, jelas bahwa kebijakan pemerintah dalam pembangunan menitikberatkan pada bidang pendidikan demi meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak konsekuen.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7.

2. Penyelenggaraan dilaksanakan secara birokratik-sentralistik.
3. Peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas, perlu ada upaya dari para profesional pendidikan.

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 M telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yang otonomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.²

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagai pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1989. Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan,

² Syafarudin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 19.

sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah, yang implementasinya ditingkat sekolah, baik rencana pengembangan sarana, dan alat ketenagaan, kurikulum, serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancangya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Mutu suatu sekolah sangat tergantung pada mutu individu-individu yang ada di dalamnya. Bila dalam suatu sekolah orang-orangnya bermutu (guru dan perangkat

yang mendukung), maka dapat diharapkan sekolah itu juga bermutu. Tetapi sebaliknya, bila orang-orang yang terlibat (bekerja) di sekolah itu tidak bermutu, tentu saja sulit diharapkan mutu pendidikan dari sekolah tersebut. Untuk itulah perlu adanya bermacam-macam pendidikan dan pelatihan yang tujuannya meningkatkan mutu individu. Pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengembangkan sikap mental sasaran didiknya, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensinya untuk bekerja, tetapi juga memperbaiki persepsi dan sikap mental terhadap mutu dan mutu kinerja. Jadi jika suatu sekolah bermaksud meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan, maka sekolah itu perlu menanamkan pengertian yang mendalam tentang mutu dan mutu kinerja pada semua orang yang bekerja di dalamnya. Hanya orang-orang yang memiliki persepsi yang benar tentang mutu yang dapat mengembangkan dunia pendidikan menjadi bermutu.

Manajemen mutu terpadu atau (*Total Quality Management*) menganut suatu pengertian bahwa dalam bekerja mutu kinerja perlu dan dapat dikelola oleh semua orang yang bekerja. Untuk berkinerja yang bermutu orang harus dapat mengidentifikasi siapa pelanggannya dan kemudian juga mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Untuk sekolah mutu yang diharapkan adalah kualitas pendidikan kepada peserta didik, dan keluarannya yang dapat bersaing di dunia pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja yang ditekuninya sesuai dengan bidang ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Tentu saja dalam hal ini yang menjadi pelanggan dari sekolah yang bermutu itu adalah masyarakat yang membutuhkan dunia pendidikan baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya.

Untuk merealisasikan pendidikan seperti di atas maka sekolah perlu melakukan peningkatan mutu. Manajemen peningkatan mutu merupakan suatu model yang dikembangkan didunia pendidikan, mutu program penyelenggaraan akademik dapat dilihat dari unsur-unsurnya sebagai indikator mutu antara lain tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, produktivitas,dan mutu lulusan. Peningkatan mutu program dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan seperti yang dikembangkan di dalam manajemen mutu terpadu yaitu: pengawas mutu, jaminan mutu,dan manajemen mutu terpadu

Dalam konteks penjaminan mutu dan upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan PP.No.19/2005 tentang standar nasional pendidikan yang menjelaskan dalam pasal 91 bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
3. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.³

Melihat pentingnya mutu pendidikan ini, penulis pada studi pendahuluan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah menemukan adanya kegiatan yang berkenaan dengan manajemen peningkatan mutu tersebut. Berdasarkan latar belakang itulah penulis ingin mengetahui secara jelas bagaimana kegiatan yang

³Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung, CV: Alfabeta, 2009), h.53.

dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, dan berminat untuk mengadakan penelitian yang berjudul “MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PADA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) UKHUWAH DI BANJARMASIN”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul di atas, penulis merasa perlu memberikan penegasan definisi tersebut:

1. Manajemen adalah mengatur atau mengelola, sedangkan menurut istilah para ahli manajemen adalah kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pokok yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang sebagai pelaksananya.⁴ Yang penulis maksud disini adalah bagaimana pengelolaan yang dilaksanakan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah.
2. Peningkatan yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan⁵
3. Mutu adalah kualitas, tingkat, derajat, kadar
4. Terpadu yaitu sudah dipadu, disatukan lebur jadi satu

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu untuk mencapai tujuan pendidikan.

⁴Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta, Mutiara, 1991), h. 18.

⁵W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2006), h. 32.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen peningkatan mutu pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah Banjarmasin ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap manajemen peningkatan mutu pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah Banjarmasin ?

D. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Mengingat mutu merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi penyelenggara kegiatan operasional kependidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan.
2. Mengingat personel sekolah perlu dibina dan dikembangkan untuk menciptakan sekolah yang berkualitas.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen peningkatan mutu pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan mutu pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lainnya pada masa yang akan datang, yang ingin meneliti tentang manajemen peningkatan mutu di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah Banjarmasin.
3. Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan penulis dan memperkaya bahan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan teoritis memuat tentang pengertian manajemen peningkatan mutu, tujuan manajemen peningkatan mutu, karakteristik manajemen peningkatan mutu, faktor-faktor manajemen peningkatan mutu.

Bab III, metode penelitian memuat tentang jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.

Bab V, penutup memuat tentang simpulan dan saran